

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Fungsi informasi dalam laporan keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal. Keandalan informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak.

Keterandalan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP paragraf 38, adalah kemampuan informasi dalam pelaporan keuangan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

Demi terselenggaranya keterandalan pelaporan keuangan yang baik, maka harus ada sumber daya manusia yang berkualitas, pemanfaatan

teknologi yang baik dalam penggunaan sistem pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Kualitas informasi dalam pembuatan laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan. Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional (Hullah *et al* 2012).

Hal pertama yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas sumberdaya manusia. Menurut Wahyono (2004:12) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan), disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumberdaya yang menghasilkannya. Sumberdaya manusia yang pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Di sini kemampuan sumberdaya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan).

Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Basis akuntansi yang diterapkan pun mengalami perubahan dari basis kas (*cash basis*) ke basis akrual (*accrual basis*). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan

kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Oleh karena itu diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, ditambah pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu dan memperlancar proses keterandalan pelaporan keuangan daerah, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Selain itu diperlukan pengendalian internal yang efektif dan efisien. Apabila informasi keuangan tersebut tidak disajikan secara andal, akan menyebabkan informasi kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan (Amey *et al* 2005 dalam Rosalin *et al* 2011).

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

B. Rumusan Masalah

Masalah-masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?

3. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris:

1. Untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menguji pengaruh pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulisnya dan orang lain. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Bagi kalangan akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan berkaitan dengan pengaruh kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian berikutnya.
3. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini akan disajikan sistematika yang sedemikian rupa sehingga apa yang penulis kemukakan diharapkan mudah untuk dipahami. Adapun pembahasan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian ketidakamanan kerja, pengertian komitmen organisasional, pengertian kepuasan kerja, pengertian keinginan keluar (*turnover intention*), penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dibahas mengenai jenis penelitian, populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang sebaran data penelitian, karakteristik responden, statistik diskriptif, pengujian instrument, dan metode analisis data.

BAB V PENUTUP

Sebagai bab terakhir berisi tentang simpulan dari peneliti yang, keterbatasan dan saran-saran yang diharapkan ada manfaatnya bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca.